

# LAPORAN AKHIR KAJIAN INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT

## TAHUN 2022



*Disusun oleh :*



**PT. WAHANA DATA UTAMA**

Graha Nurul Jl. Terapi Raya Blok AE No.1 Bumi Menteng Asri - Bogor

T : 62-251 7552099 E : [wahanadata@yahoo.com](mailto:wahanadata@yahoo.com) W : wahanadata.co.id



Kode	KAB/KOTA	UPLM1	UPLM2	UPLM3	UPLM4	UPLM5	UPLM6	UPLM7	IPLM
53.05	Alor	0,0027	1,6699	0,0035	0,4733	1,5453	0,2992	0,5187	64,47
53.06	Flores Timur	0,0043	2,5369	0,0059	0,5151	1,0140	0,3459	0,6904	73,04
53.07	Sikka	0,0035	1,9942	0,0042	0,4846	1,4347	0,2967	0,5682	68,37
53.08	Ende	0,0012	0,6951	0,0021	0,3249	1,6201	0,2066	0,3433	45,62
53.09	Ngada	0,0045	2,2526	0,0049	0,4600	1,4319	0,2867	0,8580	75,70
53.10	Manggarai	0,0003	0,0708	0,0026	0,0141	1,6000	0,0344	0,0650	25,53
53.11	Sumba Timur	0,0036	3,7428	0,0037	0,4394	1,3998	0,2639	0,7601	94,48
53.12	Sumba Barat	0,0029	1,6900	0,0009	0,3840	1,3800	0,2700	0,6003	61,83
53.13	Lembata	0,0044	2,7365	0,0053	0,4884	0,7184	0,2638	0,6038	68,87
53.14	Rote Ndao	0,0035	2,1991	0,0036	0,4193	1,2241	0,2826	0,6345	68,10
53.15	Manggarai Barat	0,0021	1,4609	0,0019	0,2097	1,2839	0,4605	0,4911	55,86
53.16	Nagekeo	0,0069	2,8267	0,0013	0,5588	1,5125	0,4757	0,6032	85,50
53.17	Sumba Tengah	0,0039	1,3429	0,0041	0,4519	1,3609	0,2785	0,6167	57,98
53.18	Sumba Barat Daya	0,0014	1,0033	0,0006	0,2267	1,1796	0,2159	0,4040	43,31
53.19	Manggarai Timur	0,0047	3,2487	0,0054	0,5298	1,0940	0,2767	0,6039	82,33
53.20	Sabu Raijua	0,0034	2,1285	0,0038	0,4207	1,0694	0,2793	0,5968	64,31
53.21	Malaka	0,0052	3,5225	0,0026	0,5399	1,0899	0,3828	0,5826	87,51
53.71	Kota Kupang	0,0018	1,3271	0,0023	0,4013	2,2849	0,3826	0,6720	72,46
	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0,0033	2,1179	0,0031	0,4110	1,3315	0,2962	0,5696	67,61

Pencapaian nilai IPLM Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar **67,61** dan masuk ke dalam **kategori Sedang**. Tiga Kab/Kota dengan pencapaian IPLM tertinggi yaitu Kab. Sumba Timur 94,48, Kab. Malaka 87,51, dan Kab. Nagekeo 85,50. Sedangkan, tiga Kab/kota yang terendah yaitu Kab. Ende 45,62, Kab. Sumba Barat Daya 43,31, dan Kab. Manggarai 25,53.

### INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT : 67,61

1	Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)	: 0,0033
2	Pemerataan Koleksi Perpustakaan (IPLM2)	: 2,1179
3	Pemerataan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)	: 0,0031
4	Tingkat Kunjungan Pemustaka (UPLM4)	: 0,4110
5	Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5)	: 1,3315
6	Keterlibatan Masyarakat Dalam Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6)	: 0,2962
7	Jumlah Pemustaka (UPLM7)	: 0,5696

### Jumlah Penduduk (BPS 2020)

**5.325.566**

### Jumlah Penduduk Usia Sekolah (Kemendikbud dan BPS 2022)

**1.156.682**

### Jumlah Penduduk Usia Perguruan Tinggi (BPS 2022)

**129.241**

NO	INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN	NILAI	INTERPRETASI
1	Rasio Ketersediaan Perpustakaan		
	a. Rasio ketersediaan perpustakaan umum	: 0,0002	Terdapat 19 perpustakaan per 100.000 penduduk
	b. Rasio ketersediaan perpustakaan sekolah	: 0,0010	Terdapat 103 perpustakaan per 100.000 penduduk usia sekolah
	c. Rasio ketersediaan perpustakaan Perguruan tinggi	: 0,0015	Terdapat 154 perpustakaan per 100.000 penduduk usia pendidikan tinggi
2	Persentase Perpustakaan Dipersepsi ber-SNP	: 19,66%	Terdapat 19,66% perpustakaan yang dipersepsi memenuhi standar nasional perpustakaan
3	Rasio Ketercukupan Koleksi Berdasarkan IFLA/UNESCO	: 0,0858	Belum Memenuhi
4	Kekurangan Jumlah Koleksi Berdasarkan IFLA/UNESCO	: 9.736.815	Kekurangan koleksi di PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR sebanyak 9736814,822
5	Rasio Ketercukupan koleksi berdasarkan target Renstra	: 1 : 6	1 judul koleksi dapat diakses oleh 6 penduduk
6	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	: 1: 22956	1 tenaga perpustakaan melayani 22956 penduduk
7	Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan	: 2,61%	Persentase jumlah kunjungan per hari dibagi per jumlah penduduk sebanyak 2,61%, sudah ideal.
8	Tingkat Keaktifan Kegiatan Sosialisasi & Pemanfaatan Perpustakaan	: 0,60%	Keaktifan dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan KIE dan pemanfaatan perpustakaan sebanyak 0,6%
9	Tingkat <i>Engagement</i> Anggota Perpustakaan	: 1,09%	Terdapat 1,09% penduduk yang merupakan anggota perpustakaan

7	Tingkat <i>Engagement</i> Anggota Perpustakaan	:	0,36%	Terdapat 0,36% penduduk yang merupakan anggota perpustakaan
---	--	---	-------	---

## Kab. Sabu Raijua

<b>INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT</b>		:	<b>64,31</b>
1	Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)	:	0,0034
2	Pemerataan Koleksi Perpustakaan (IPLM2)	:	2,1285
3	Pemerataan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)	:	0,0038
4	Tingkat Kunjungan Pemustaka (UPLM4)	:	0,4207
5	Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5)	:	1,0694
6	Keterlibatan Masyarakat Dalam Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6)	:	0,2793
7	Jumlah Pemustaka (UPLM7)	:	0,5968

<b>Jumlah Penduduk (BPS 2020)</b>	<b>89.327</b>
Jumlah Penduduk Usia Sekolah (Kemendikbud dan BPS 2022)	<b>20.203</b>
Jumlah Penduduk Usia Perguruan Tinggi (BPS 2022)	<b>0</b>

NO	INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN	NILAI	INTERPRETASI
1	Rasio Ketersediaan Perpustakaan		
	a. Rasio ketersediaan perpustakaan umum	: 0,0008	Terdapat 79 perpustakaan per 100.000 penduduk
	b. Rasio ketersediaan perpustakaan sekolah	: 0,0002	Terdapat 25 perpustakaan per 100.000 penduduk usia sekolah
	c. Rasio ketersediaan perpustakaan Perguruan tinggi	: 0,000000	Terdapat 0 perpustakaan per 100.000 penduduk usia pendidikan tinggi
2	Persentase Perpustakaan Dipersepsi ber-SNP	: 3,33%	Terdapat 3,33% perpustakaan yang dipersepsi memenuhi standar nasional perpustakaan
3	Rasio Ketercukupan Koleksi Berdasarkan IFLA/UNESCO	: 0,2114	Belum Memenuhi
	Kekurangan Jumlah Koleksi Berdasarkan IFLA/UNESCO	: 140.882	Kekurangan koleksi di Kab. Sabu Raijua sebanyak 140882
4	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	: 1: 14888	1 tenaga perpustakaan melayani 14888 penduduk
5	Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan	: 5,07%	Persentase jumlah kunjungan per hari dibagi per jumlah penduduk sebanyak 5,07%, sudah ideal.
6	Tingkat Keaktifan Kegiatan Sosialisasi & Pemanfaatan Perpustakaan	: 2,71%	Keaktifan dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan KIE dan pemanfaatan perpustakaan sebanyak 1,2%
7	Tingkat <i>Engagement</i> Anggota Perpustakaan	: 3,35%	Terdapat 3,35% penduduk yang merupakan anggota perpustakaan

## Kab. Sikka

<b>INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT</b>		:	<b>68,37</b>
---	--	---	--------------

<b>Jumlah Penduduk (BPS 2020)</b>	
-----------------------------------	--

**BAB**  
**5****PENUTUP****5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tahun 2022 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pencapaian nilai IPLM Tahun 2022.
  - a. Nilai IPLM Nasional tahun 2022 sebesar 64,48 atau 13,55 (skala 0-20) yang sudah masuk "**KATEGORI SEDANG**".
  - b. Target Renstra Perpustnas IPLM Tahun 2022 adalah 13 dan hasil kajian IPLM sudah tercapai 13,55. Artinya IPLM sudah tercapai 104,23% dari target yang sudah ditetapkan.
  - c. *Trend* perkembangan IPLM dari kurun waktu tahun 2018 sampai tahun 2022 menunjukkan kenaikan.
  - d. Lima provinsi dengan pencapaian nilai IPLM tahun 2022 tertinggi yaitu DI Yogyakarta 83,63, DKI Jakarta 80,87, Sulawesi Selatan 78,49, Kalimantan Selatan 75,71, dan Jawa Timur 74,73.
  - e. Lima provinsi dengan pencapaian nilai IPLM terendah yaitu Maluku 49,77, Maluku Utara 46,81, Sulawesi Barat 41,36, Papua Barat 37,58, dan Papua 20,02.
- 2) Pemerataan layanan perpustakaan.
  - a. Pemerataan layanan perpustakaan semakin meningkat, hal tersebut ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah perpustakaan pada tahun 2022 yaitu 185.412 perpustakaan yang terdiri dari 27.861 perpustakaan umum, 149.500 perpustakaan sekolah, 2.724 perpustakaan perguruan tinggi, dan 5.327 perpustakaan khusus.
  - b. Lima provinsi dengan jumlah perpustakaan terbanyak adalah Jawa Tengah 26.124, Jawa Barat 23.158, Jawa Timur 20.080, Sulawesi Selatan 11.145, dan Sumatera Utara 9.354.
  - c. Lima provinsi dengan jumlah perpustakaan terendah adalah Sulawesi Barat 866, Papua 827, Maluku Utara 757, Papua Barat 718, dan Kalimantan Utara 332 perpustakaan.
  - d. Rasio ketersediaan perpustakaan nasional adalah 11 perpustakaan umum per 100.000 penduduk, 300 perpustakaan per 100.000 penduduk usia

- sekolah dan 32 perpustakaan perguruan tinggi per 100.000 penduduk usia pendidikan tinggi.
- e. Rasio ketersediaan perpustakaan tertinggi untuk masing-masing jenis perpustakaan yaitu Bengkulu dengan adanya 37 perpustakaan umum per 100.000 penduduk, DI Yogyakarta dengan tersedianya 409 perpustakaan sekolah per 100.000 penduduk usia sekolah, dan Sulawesi Selatan dengan tersedianya 376 perpustakaan perguruan tinggi per 100.000 penduduk usia perguruan tinggi.
  - f. Rasio ketersediaan perpustakaan terendah untuk masing-masing jenis perpustakaan yaitu Gorontalo dengan adanya 1 perpustakaan umum per 100.000 penduduk, Papua dengan tersedianya 39 perpustakaan sekolah per 100.000 penduduk usia sekolah, dan Kalimantan Utara dengan tersedianya 2 perpustakaan perguruan tinggi per 100.000 penduduk usia perguruan tinggi.
- 3) Perpustakaan yang dibina sesuai standar SNP
- a. Jumlah perpustakaan di Indonesia yang sudah dibina sesuai standar SNP sebanyak 78.897 perpustakaan yang terdiri dari 77,290 perpustakaan sekolah (87,70%), 7.676 perpustakaan umum (8,71%), 1.621 perpustakaan khusus (1,84%) dan 1.547 perguruan tinggi (1,76%).
  - b. Persentase jumlah perpustakaan yang dibina sesuai standar SNP terhadap jumlah perpustakaan total adalah 47,53% yang terdiri dari perpustakaan umum 27,55%, perpustakaan sekolah 51,70%, perpustakaan perguruan tinggi 56,79%, dan perpustakaan khusus 30,43%.
  - c. Target Renstra Perpunas untuk indikator peningkatan perpustakaan sesuai standar pada Tahun 2022 adalah 21,42% dan hasil kajian sudah mencapai 47,27%. Artinya perpustakaan sesuai standar sudah tercapai 221,90% dari target yang sudah ditetapkan.
  - d. Lima provinsi dengan jumlah perpustakaan yang dibina sesuai standar SNP tertinggi adalah Jawa Timur 13.903 perpustakaan, Jawa Barat 11.446 perpustakaan, Sulawesi Selatan 5.866 perpustakaan, Jawa Tengah 5.110 perpustakaan, dan Sumatera Utara 3.972 perpustakaan.
  - e. Lima provinsi dengan jumlah perpustakaan yang dibina sesuai standar SNP terendah adalah Papua Barat 384 perpustakaan, Papua 258 perpustakaan, Maluku Utara 180 perpustakaan, Sulawesi Barat 144 perpustakaan, dan Kalimantan Utara 127 perpustakaan.

- 4) Pemerataan koleksi perpustakaan
  - a. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan berdasarkan IFLA/UNESCO dihitung dengan rumusan jumlah koleksi dibagi 2 (dua) kali jumlah penduduk. Jumlah koleksi secara nasional hasil kajian IPLM tahun 2022 sebanyak 26.761.152 koleksi sehingga rasio ketercukupan koleksi perpustakaan umum di Indonesia adalah sebesar 0,0495.
  - b. Lima provinsi dengan rasio ketercukupan jumlah koleksi perpustakaan tertinggi yaitu Kepulauan Bangka Belitung 0,327, Maluku 0,2227, Bali 0,1945, Sulawesi Tenggara 0,1498, dan Kalimantan Timur 0,1331.
  - c. Lima provinsi yang terendah yaitu Papua 0,0234, Sulawesi Barat 0,0225, Kepulauan Riau 0,0179, Lampung 0,0086, dan Sumatera Utara 0,0066.
  - d. Target Renstra untuk indikator Rasio ketercukupan koleksi tahun 2022 yaitu 1:14 dan rasio hasil kajian tahun 2022 adalah 1:10. Artinya satu judul koleksi perpustakaan umum dapat diakses oleh 10 penduduk atau pemustaka dan sudah melebihi dari target yang sudah ditetapkan.
  - e. Koleksi perpustakaan perpustakaan umum terbanyak terdiri dari kategori buku Ilmu Pengetahuan Sosial 18,2%, Teknologi 15,0%, Agama 13,3%, serta Geografi dan Sejarah 12,7% dari total koleksi yang ada di perpustakaan umum provinsi. Sedangkan jumlah koleksi terendah adalah kategori sastra 6,8%, komputer, informasi dan karya umum 5,1%, serta filsafat dan psikologi sebanyak 3,9%.
  - f. Jumlah koleksi perpustakaan yang dipinjam oleh pemustaka terdiri dari Ilmu Pengetahuan Sosial sebanyak 17,25%, Teknologi sebanyak 13,3%, Agama sebanyak 12,7%, dan Sastra 10,5%.
- 5) Tingkat pemerataan tenaga perpustakaan
  - a. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan umum di Indonesia hasil kajian IPLM tahun adalah 1:17.978, artinya 1 tenaga perpustakaan melayani 17.978 penduduk.
  - b. Pencapaian rasio ketercukupan tenaga perpustakaan paling tinggi adalah provinsi Sulawesi Barat yaitu 1:3.046 dan rasio yang terendah yaitu Provinsi Jawa Timur yaitu 1:131.180.
  - c. Target Renstra untuk indikator rasio ketercukupan tenaga perpustakaan tahun 2022 adalah 1:18.000 dan sudah memenuhi target Renstra Perpustakaan Nasional dengan tingkat pencapaian 100,12%..
- 6) Tingkat kemanfaatan perpustakaan

- a. Tingkat kemanfaatan perpustakaan di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 2,08% Nilai tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2021.
  - b. Tingkat kemanfaatan perpustakaan sudah memenuhi standar IFLA dengan tingkat pencapaian 104% dari standar yang telah ditetapkan oleh IFLA sebesar 2%.
  - c. Tingkat kemanfaatan perpustakaan tahun 2022 sudah memenuhi target Renstra perpusnas dengan tingkat pencapaian 138,67% dari target yang sudah ditetapkan sebesar 1,5%.
  - d. Lima provinsi dengan tingkat kemanfaatan perpustakaan tertinggi yaitu Kalimantan Selatan 3,91%, Jawa Timur 3,86%, Sumatera Selatan 3,07%, Sulawesi Tenggara 2,67%, dan Nusa Tenggara Timur 2,61%..
  - e. Lima provinsi yang terendah yaitu Papua Barat 0,68%, Maluku Utara 0,67%, Kalimantan Timur 0,51%, Papua 0,32%, dan Gorontalo 0,06%.
- 7) Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan
- a. Lima provinsi dengan tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi tertinggi yaitu Sumatera Selatan 8,17%, DKI Jakarta 6,93%, Bengkulu 6,16%, Jawa Tengah 6,15%, dan Sumatera Utara 6,07%.
  - b. Lima provinsi yang terendah yaitu Jawa Timur 0,9%, Nusa Tenggara Barat 0,88%, Nusa Tenggara Timur 0,6%, Kalimantan Barat 0,53%, dan Kalimantan Timur 0,4%.
- 8) Jumlah pemustaka
- a. Tingkat *engagement* anggota perpustakaan di perpustakaan umum sebanyak 5.940.422 atau 2,20% dari total jumlah penduduk Indonesia.
  - b. Lima provinsi dengan tingkat *engagement* anggota perpustakaan tertinggi yaitu Bengkulu 18,57%, Gorontalo 8,03%, Kalimantan Selatan 4,76%, DI Yogyakarta 4,47%, dan Kalimantan Utara 3,8%.
  - c. Lima provinsi dengan tingkat *engagement* Kalimantan Barat 0,67%, Sulawesi Barat 0,58%, Kepulauan Riau 0,44%, Papua 0,23%, dan Lampung 0,02%.
- 9) Regulasi dan Anggaran
- a. Hasil survei dan studi literatur dapat diinventarisasi 548 regulasi daerah terkait perpustakaan. Regulasi daerah tersebut terdiri dari 49% peraturan

- bupati, 27% peraturan daerah, 16% peraturan Wali Kota, dan 8% Peraturan Gubernur.
- b. Regulasi daerah terkait perpustakaan mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebanyak 58%, Penyelenggaraan Perpustakaan sebanyak 39%, dan Pengembangan Perpustakaan sebanyak 3%.
  - c. Sumber anggaran perpustakaan yang diatur dalam regulasi daerah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; sebagian anggaran pendidikan; sumbangan masyarakat yang tidak mengikat; kerja sama yang saling menguntungkan; bantuan luar negeri yang tidak mengikat; hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau sumber lain yang sah.
  - d. Pemerintah Daerah sudah mengalokasikan dana anggaran khusus untuk operasional dan pengembangan perpustakaan tetapi jumlahnya masih sangat minim jika dibandingkan dengan kebutuhan per kapita penduduk.
  - e. Penggunaan anggaran perpustakaan mengalami kendala dengan adanya pengurangan anggaran akibat covid 19. Di samping itu, penyerapan anggaran yang tersedia juga tidak optimal dalam penggunaannya.

## 5.2. Rekomendasi

### 1. Peningkatan nilai IPLM

- a. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dilahirkan sebagai upaya formulasi kebijakan, serta pengembangan dan pembinaan semua jenis perpustakaan di Indonesia di mana ada kebutuhan akan ketersediaan data yang akurat dan holistik tentang semua jenis perpustakaan pada aspek-aspek yang berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan. Oleh karena itu, nilai IPLM nasional dapat dilakukan peningkatan IPLM yang komprehensif dengan mengedepankan dikotomi kewenangan ranah pusat, provinsi dan/atau kab/kota.
- b. Perlu adanya upaya peningkatan nilai IPLM Provinsi terutama terhadap provinsi yang pencapaian IPLM masuk ke dalam kategori sangat rendah dan rendah yaitu Aceh, Lampung, Maluku, Papua Barat, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua.
- c. Nilai IPLM baik nasional maupun provinsi merupakan agregasi dari IPLM Kab/Kota sehingga peningkatan IPLM juga di fokuskan pada Kabupaten atau Kota yang tingkat pencapaian IPLM masih rendah di semua provinsi. Dengan demikian setiap provinsi harus melakukan evaluasi dalam

meningkatkan nilai IPLM Provinsi sebagai upaya pengembangan perpustakaan yang merata. Berikut contoh peningkatan IPLM Kab/Kota di setiap provinsi yang pencapaian nilai IPLM masuk **kategori rendah** dan **sangat rendah**, yaitu:

- Aceh : Kab. Pidie, Kab. Aceh Selatan, Kota Langsa, Kab. Aceh Besar, Kab. Bener Meriah, Kab. Aceh Utara, Kab. Bireun, Kab. Nagan Raya, Kab. Simeulue.
- Sumatera Utara : Kab. Labuan Batu, Kab. Nias Barat, Kab. Karo, Kab. Batu bara, Kab. Asahan, Kota Gunung Sitoli, Kab. Humbang Hasudutan, Kab. Padang Lawas, Kab. Nias Utara, Kab. Nias, Kab. Mandailing Natal, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Samosir, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Nias Selatan, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Deli Serdang, Kab. Dairi, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Langkat, Kab. Tapanuli Tengah
- Sumatera Barat : Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Solok
- Lampung : Kab. Lampung Utara, Kab. Pringsewu, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Tengah
- Kepulauan Bangka Belitung : Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat
- Jawa Barat : Kab. Sukabumi, Kab. Sumedang, Kab. Subang
- Jawa Tengah : Kab. Wonogiri, Kab. Kendal, Kab. Rembang, Kab. Pati, Kab. Blora
- Jawa Timur : Kab. Tuban, Kab. Sumenep
- Banten : Kab. Lebak, Kab. Serang
- Bali : Kab Buleleng
- Nusa Tenggara Barat : Kab. Dompu
- Nusa Tenggara Timur : Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Ende, Kab. Manggarai
- Kalimantan Barat : Kab. Kapuas Hulu, Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya

## 2. Pemerataan layanan perpustakaan.

- a. Perlu adanya perhatian khusus terhadap pemerataan layanan perpustakaan karena dapat menjadi salah satu kunci dalam peningkatan nilai IPLM secara umum. Semakin banyak perpustakaan di suatu daerah maka akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam memanfaatkan perpustakaan. Kebijakan tersebut akan berdampak pada peningkatan unsur pembangun literasi masyarakat yang lainnya seperti

- koleksi, tenaga perpustakaan, kunjungan masyarakat dan jumlah pemustaka di suatu daerah.
- b. Perlu adanya peningkatan pemerataan layanan perpustakaan di luar Jawa terutama di daerah yang masih minim jumlah perpustakaannya seperti Sulawesi barat, Papua, Maluku Utara, Papua Barat, dan Kalimantan Utara.
  - c. Penambahan perpustakaan yang perlu menjadi prioritas adalah penambahan jenis perpustakaan umum yang rasio ketersediaannya paling rendah jika dibandingkan dengan jenis perpustakaan lainnya.
  - d. Perlu adanya dukungan teknologi informasi maupun internet di perpustakaan sehingga memudahkan pemustaka dalam mencari koleksi yang dibutuhkan.
3. Perpustakaan yang dibina sesuai standar SNP
- a. Perpustakaan perlu meningkatkan pembinaan terhadap perpustakaan agar perpustakaan yang beroperasi sesuai dengan SNP. Hal tersebut akan berdampak langsung dalam peningkatan IPLM secara umum, karena peraturan tentang standar perpustakaan nasional mengatur hampir semua unsur pembangun literasi masyarakat.
  - b. Peningkatan pembinaan perpustakaan sesuai SNP terutama dilakukan pada lima provinsi yang memiliki perpustakaan yang dibina sesuai standar SNP terendah yaitu Papua, Aceh, Maluku Utara, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Utara.
4. Peningkatan jumlah tenaga perpustakaan
- a. Target renstra untuk rasio kecukupan tenaga perpustakaan adalah 1:18.000 sehingga perlu ada penambahan 249 orang tenaga perpustakaan agar memenuhi target renstra yang telah ditentukan.
  - b. Penambahan jumlah tenaga perpustakaan diprioritaskan pada daerah yang rasio nya paling kecil.
5. Jumlah koleksi perpustakaan
- a. Pemerintah perlu melakukan peningkatan jumlah koleksi/Judul buku yang tersedia di perpustakaan terutama perpustakaan umum di daerah. Ketersediaan koleksi mengacu pada standar yang sudah ditetapkan oleh IFLA/UNESCO yaitu dua koleksi per kapita penduduk.

- b. Berkaitan dengan pemerataan maka perlu dilakukan peningkatan pada daerah dengan rasio ketercukupan terendah yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Lampung, dan Sumatera Utara.
  - c. Penambahan koleksi perpustakaan harus memperhatikan ketersediaan stok koleksi dan banyak jenis koleksi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penambahan koleksi harus memberikan manfaat lebih bagi pemustaka dalam memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan.
  - d. Koleksi perpustakaan tidak hanya berupa buku cetak atau sejenisnya tetapi juga memperhatikan ketersediaan koleksi digital. Pemustaka yang hadir pada umumnya terdiri dari beberapa kelompok umur yang berbeda karakter dalam membaca. Generasi milenial terbiasa dengan buku cetak, tetapi generasi z pada umumnya terbiasa dengan gadget sehingga koleksi digital dapat dijadikan opsi dalam meningkatkan literasi generasi z.
6. Pemanfaatan perpustakaan
- a. Kegiatan sosialisasi perpustakaan perlu ditingkatkan kepada masyarakat, terutama berkaitan dengan perpustakaan umum yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
  - b. Kegiatan sosialisasi dapat memanfaatkan platform media sosial seperti *youtube*, *facebook*, *instagram*, dan lainnya.
  - c. Peningkatan jumlah *engagement* anggota perpustakaan perlu dilakukan terutama di daerah dengan tingkat *engagement* yang rendah yaitu provinsi terendah yaitu Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Kepulauan Riau, Papua, dan Lampung.
  - d. Pemanfaatan perpustakaan juga perlu ditingkatkan karena secara nasional masih sangat rendah. Fokus peningkatan terutama lima provinsi yang terendah yaitu Sulawesi Utara, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
7. Regulasi dan anggaran
- a. Perpustakaan sudah didukung oleh regulasi yang baik di daerah. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa regulasi tersebut berjalan dengan baik di daerah.
  - b. Regulasi daerah yang berkaitan dengan pengembangan perpustakaan perlu ditingkatkan karena regulasi tersebut mengatur secara spesifik tentang perpustakaan terutama dalam memberikan layanan kepada pemustaka.

- c. Perlu adanya peningkatan anggaran perpustakaan di tahun 2023, karena untuk meningkatkan literasi masyarakat perlu adanya dukungan anggaran terutama dalam pengadaan koleksi.
- d. Daya serap anggaran harus dioptimalkan agar layanan perpustakaan agar kebutuhan pemustaka terhadap layanan perpustakaan dapat terpenuhi sehingga mampu meningkatkan literasi masyarakat.